

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kepemimpinan Kepala Lembang

1. Pengertian Kepemimpinan Kepala Lembang

Kepala lembang adalah pemerintah atau perangkat lembang yakni sebagai unsur penyelenggara dalam pemerintahan lembang atau desa. Kepala lembang harus mampu meningkatkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur lembang, karena mengingat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan lembang. Jika program yang direncanakan sesuai yang diinginkan oleh pemerintah atau masyarakat setempat, maka dapat menghambat kelancaran pembangunan. Kepala lembang merupakan tongkat penentu keberhasilan pembangunan lembang atau wilayah tersebut. Sebagai kepala lembang adalah seorang pemimpin dalam masyarakat lembang yang di mana kegagalan atau kesuksesan dalam pembangunan lembang sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan dari seorang kepala lembang karena kepala pemerintahan merupakan pusat posisi kepala lembang sangat penting terhadap masyarakat yang dipimpinnya.⁹

⁹ Mahamad Mu'iz Raharjo, *Kepemimpin Kepala Desa*,(Jakarta Timur:Bumi Aksara,2020), hlm32

Kepala lembang adalah orang yang dipilih langsung oleh masyarakat, dengan mengadakan pemilihan Kepala Lembang. Dalam pasal 14 (1) menyatakan adalah bahwa tugas Kepala Desa atau Lembang, melaksanakan pembangunan Lembang, masyarakat Lembang, dan pemberdayaan masyarakat Lembang.

2. Tugas Kepala Lembang

Berdasarkan Undang-Undang pasal 26 ayat 2 Kepala Lembang dan desa dalam melaksanakan tugasnya yaitu:

- a. Menetapkan regulasi Lembang yang telah disetujui oleh BPL.
- b. Memperkuat kehidupan sosial masyarakat Lembang.
- c. Memimpin pelaksanaan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang disepakati bersama Badan Permusyawaratan Lembang (BPL).
- d. Mengusulkan draft peraturan Lembang.
- e. Mendorong pertumbuhan ekonomi Lembang.
- f. Melakukan tugas lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Mewakili kepentingan Lembang di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk penasihat hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- h. Merancang dan mengusulkan draft regulasi Lembang untuk dibahas dan disahkan bersama BPL.

- i. Mengoordinasikan pembangunan Lembang secara partisipasi.¹⁰

3. Kewajiban Kepala Lembang

Adapun yang menjadi kewajiban kepala lembang dan desa, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 26 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:¹¹

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama.
- b. Menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- c. Mematuhi dan menerapkan ajaran Pancasila serta menjalankan konstitusi 1945, serta berkomitmen untuk menjaga kesatuan Negara Indonesia.
- d. Memastikan kedamaian dan ketertiban di tengah masyarakat.
- e. Berinteraksi secara profesional dengan rekan kerja di dalam pemerintahan.
- f. Mengadopsi prinsip tata pemerintahan yang transparan, bersih dari praktik kolusi dan korupsi.
- g. Patuh dan menjalankan semua peraturan hukum yang berlaku.
- h. Memediasi konflik yang timbul di lingkungan pemerintahan.
- i. Bertanggung jawab dalam melakukan proses pengelolaan pemerintahan.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hlm 14

¹¹ ibid, hlm 16

- j. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan lembang.
- k. Menggali potensi sumber daya alam sambil menjaga kelestarian lingkungan.
- l. Membangkitkan potensi masyarakat dan institusi.
- m. Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang efisien di tingkat lembang.
- n. Menjalankan tugas yang berada dalam kewenangan pemerintahan setempat.
- o. Membina, mendukung, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya serta adat istiadat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kewajiban kepala lembang yaitu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memiliki tanggung jawab yang baik dalam membina dan memberdayakan masyarakat dalam potensi melestarikan lingkungan hidup atau alam.

4. Peran Kepala Lembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Kepala lembang perlu berperan sebagai penyelenggara yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan serta implementasi program-program.

- a. Peran Kepala Lembang Sebagai Motivator

Peran Kepala lembang adalah motivasi masyarakat lembang untuk mengambil bagian dalam pembangunan, dan memastikan tidak terjadi konflik antara pemerintah dan masyarakat. Kepala lembang juga harus mampu memotivasi masyarakatnya untuk ikut program kemasyarakatan untuk mencapai suatu tujuan, sehingga terpenuhi kebutuhan masyarakat lembang dalam proses pembangunan lembang dan desa.

b. Peran Kepala Lembang Sebagai Fasilitator

Peran kepala lembang sebagai fasilitator adalah mendukung masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang ada dilembang. Sebagai fasilitator seorang kepala lembang dan desa harus memberikan informasi.

c. Peran Kepala Lembang Sebagai Mobilisator

Peran kepala lembang sebagai mobilisator adalah menentukan perencanaan pembangunan lembang. Kepala lembang harus mampu melakukan mobilisasi, pengawasan, dan menjadi pemimpin dalam pembangunan. Peran Mobilisator dalam pembangunan lembang adalah menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk mengambil tindakan.¹²

¹² Mufidah, Indartuti, *Peran Kepala Desa Peran Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Yang Partisipatif*, (*Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2022), vol 3 no 06 ,hlm122

5. **Strategis Kepemimpinan Kepala Lembaga Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

- a. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, kepala lembaga perlu memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif agar dapat berinteraksi dengan jelas dan terbuka dengan masyarakat. Ini mencakup kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan tepat, menerima masukan, dan memahami kebutuhan yang ada di tengah masyarakat.
- b. Mendorong keterlibatan masyarakat dapat dilakukan dengan menggelar berbagai kegiatan seperti pertemuan terbuka, forum, atau kelompok diskusi. Melalui cara ini, masyarakat dapat aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada mereka.
- c. Pendidikan dan Pelatihan: Mengorganisir pelatihan atau lokakarya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu atau proses keputusan yang terkait dengan lembaga tersebut.
- d. Transparansi: Membuka akses terhadap informasi yang relevan dan penting bagi masyarakat. Ini menciptakan kepercayaan dan memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami aktivitas lembaga.

- e. Kolaborasi dengan LSM dan Swasta: Bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah dan sektor swasta untuk mendukung program-program yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- f. Mengingatn Kebutuhan Masyarakat: Mendengarkan dan menanggapi kebutuhan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program lembaga.
- g. Evaluasi dan Umpan Balik: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap inisiatif dan program yang telah diluncurkan dan menerima masukan dari masyarakat untuk perbaikan berkelanjutan.
- h. Kepemimpinan Inklusif: Membangun tim kepemimpinan yang beragam dan inklusif, yang mencerminkan keragaman masyarakat, agar dapat lebih baik mewakili beragam perspektif.

B. Partisipasi Masyarakat

Secara etimologis, asal usul partisipasi dapat ditelusuri dari akar kata dalam bahasa Latin, *pars* yang berarti bagian, dan *capere* yang berarti mengambil. Dengan demikian, partisipasi diinterpretasikan sebagai "mengambil bagian". Dalam konteks bahasa Inggris, istilah "participate" atau "participation" merujuk pada aksi mengambil bagian atau peran. Menurut Dedi Supriadi, partisipasi mengacu pada proses membuat keputusan yang melibatkan saran dari anggota atau masyarakat, serta keterlibatan dalam menyampaikan pendapat, keterampilan, serta menyediakan bahan dan jasa.

Bentuk partisipasi dapat berupa kehadiran dalam rapat, memberikan kontribusi berupa ide, respons, atau penolakan terhadap program yang diajukan.¹³

Keterlibatan masyarakat merupakan bagian integral dari proses pembangunan, di mana masyarakat secara aktif terlibat dalam berbagai tahapan, termasuk penyusunan program, penyediaan layanan, perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial, baik di dalam maupun di luar lingkungan mereka. Hal ini didasarkan pada kesadaran dan tanggung jawab sosial yang dirasakan oleh individu dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat sangatlah berarti dan mempunyai dampak yang positif dalam proses pembangunan karena tanpa bantuan atau partisipasi aktif dari masyarakat pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menjalankan pembangunan karena tanpa adanya dukungan atau dorongan dari masyarakat pemerintah tidak dapat menjalankan pembangunan atau tanggung jawabnya.¹⁴

1. Prinsip-Prinsip Partisipasi

Prinsip-prinsip partisipasi yang terungkap dalam panduan Pelaksanaan pendekatan partisipasi yang dirumuskan oleh Department For Internasional Development (DFID) (Seumampow) meliputi:¹⁵

¹³ Hendra Karianga, *Partisipasi Masyarakat*, (yogyakarta:Alumni, 2023), hlm.213

¹⁴ HAKIM, Arif Rahman; IMAN, S.; HASANAH, Nur. *Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2018)

¹⁵ <https://www.Kajianpustaka.com>

- a. Melibatkan semua individu atau perwakilan dari semua yang terdampak oleh hasil suatu keputusan atau proses pembangunan proyek.
- b. Prinsip kesetaraan dan kemitraan adalah esensial. Setiap individu memiliki keterampilan, kemampuan, dan inisiatif, serta memiliki hak untuk menggunakan inisiatif tersebut dalam setiap tahap dialog pembangunan, tanpa memandang hierarki atau struktur masing-masing pihak.
- c. Prinsip transparansi harus dipraktikkan. Setiap individu harus mampu menciptakan dan memelihara iklim komunikasi terbuka agar dialog dapat berkembang.
- d. Keseimbangan kekuasaan harus dijaga. Individu yang terlibat harus mampu menyeimbangkan distribusi kekuasaan dan kewenangan untuk mencegah dominasi.
- e. Kerjasama yang solid diperlukan. Kolaborasi dari berbagai pihak yang terlibat diperlukan untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing dan mengurangi kelemahan yang timbul, terutama yang terkait dengan sumber daya manusia.
- f. Pemberdayaan individu adalah kunci. Setiap individu harus diaktifkan dalam proses pembelajaran dan kegiatan, mengakui serta memperkuat satu sama lain dalam menghadapi tantangan dan kelebihan masing-masing.

2. Bentuk Partisipasi

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, terdapat partisipasi vertical yang terjadi ketika individu atau kelompok masyarakat terlibat dalam suatu program atau kegiatan yang diinisiasi oleh pihak lain, seringkali dalam konteks hierarki sosial yang menempatkan mereka pada posisi bawahan atau pengikut. Kedua, terdapat partisipasi horizontal yang melibatkan anggota atau kelompok masyarakat yang bekerja sama dalam suatu kegiatan. Jenis partisipasi ini sering menjadi indikator awal perkembangan masyarakat yang mampu berkembang secara independen.

- a. Berpartisipasi dalam memberikan kontribusi secara finansial.
- b. Berpartisipasi dalam memberikan bantuan dengan kekuatan fisik.
- c. Berpartisipasi dalam memberikan dukungan materi.
- d. Berpartisipasi dalam memberikan dukungan moral, seperti dukungan, nasihat, dorongan, atau arahan.¹⁶

3. Manfaat Partisipasi

- a. Kemungkinan besar tercapainya keputusan yang tepat karena adanya banyak bantuan yang memberikan manfaat positif.

¹⁶ ibid, hlm 36

- b. Memberikan prioritas pada komunikasi dua arah sehingga baik karyawan maupun pimpinan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pemikiran dan saran.
- c. Mendorong pengembangan kemampuan berpikir kreatif demi kepentingan kolektif.
- d. Berkomitmen untuk bertanggung jawab dan mendorong kolaborasi dalam memajukan kepentingan bersama.
- e. Mengizinkan partisipasi dalam setiap perubahan yang terjadi.¹⁷

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Menurut Sastrowardoyo (2005) dan Mustaqim, dalam literatur tentang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, terdapat faktor-faktor yang memiliki dampak signifikan terhadap tingkat keterlibatan masyarakat.¹⁸

a. Faktor Intern

1. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang dijalankan ditentukan oleh kapabilitas atau kesadaran mereka.
2. Kualitas pendidikan yang diperoleh masyarakat berdampak pada kemampuan mereka dalam memahami rencana pembangunan.

¹⁷ Ahmad Mustanir, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan* (Jawa Timur, Qiara Media, 2022) hlm. 38

3. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh taraf penghasilan atau pendapatan yang mereka peroleh

b. Faktor Ekstern

1. Peran kepemimpinan pemerintahan atau aparat dalam memberikan arahan kepada masyarakat.
2. Ketersediaan fasilitas atau dukungan yang diberikan dalam pemilihan pemerintahan¹⁹

C. Pembangunan Lembang

1. Pengertian Pembangunan Lembang

Proses pembangunan merupakan suatu rencana yang bertujuan mencapai kemakmuran, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan masyarakat dengan memperhatikan beragam dimensi kehidupan, termasuk aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, keuangan, sumber daya manusia, dan alam.²⁰ Menurut Simamora 2006 bahwa pembangunan adalah peralihan ke arah suatu model yang memungkinkan masyarakat untuk lebih mengenali nilai-nilai, kemanusiaan untuk mewujudkan, masyarakat untuk memiliki kendali lebih besar atas lingkungan dan tujuannya, politiknya dan apa yang memungkinkannya masyarakat negaranya untuk mengambil kendali atas diri mereka.²¹

¹⁹ ibid, hlm.40

²⁰ Budi Sunarso, *Sosiologi pembangunan desa atau lembang*, (Jawa timur: Umair Inspirasi Indonesia, 2023), hlm. 4

²¹ Ariadi, *Perencanaan Pembangunan Desa*, (Meraja Journal, vol.2 no.2 2019), hlm 3

2. Tujuan Pembangunan Lembang

Adapun tujuan pembangunan lembang sebagai berikut:

- a. Memperkuat pengolahan dan pengendalian memanfaatkan ruang.
- b. Meningkatkan kualitas perumahan yang aman, nyaman, dan sehat.
- c. Menciptakan lingkungan hidup yang efisien dan efektif.
- d. Meningkatkan pelayanan terkait permasalahan pertanahan dan pengolahan sesuai kewenangannya.
- e. Meningkatkan perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
- f. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan wilayah
- g. Pembangunan perlembagaan atau pedesaan.
- h. Meningkatkan infrastruktur wilayah didaerah tertinggi, terpencil, dan wilayah dalam batasan.
- i. Mengatai kesenjangan antar wilayah.²²

Jadi kesimpulan dari tujuan pembangunan yaitu mampu meningkatkan kualitas pelayanan dalam bidang perekomian dan pembangunan lingkungan masyarakat baik itu daerah tertinggi maupun terpencil.

3. Cara Meningkat Pembangunan Lembang

²² Fatmawati, Lukman halim, and Mappamiring, "Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa 1.1 (2019): 16

- a. Pemetaan potensi di daerah Lembang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai aspek potensial yang dimiliki, termasuk sumber daya alam, tenaga kerja, infrastruktur, dan potensi lainnya.
- b. Penyusunan rencana pembangunan desa atau lembang yaitu harus disusun dengan melibatkan masyarakat lembang dan pihak lain dalam rencana pembangunan lembang harus juga mencantumkan proker pembangunan yang akan dilaksanakan serta anggaran yang dibutuhkan dalam pembangunan.
- c. Pengembangan potensi ekonomi lembang adalah memberikan pelatihan dan batuan modal kepada masyarakat untuk membuka usaha.
- d. Peningkatan sumber daya manusia yaitu untuk meningkat SDM dan memberikan pendidikan atau pelatihan kepada masyarakat lembang.
- e. Pembangunan infrastruktur yaitu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat seperti jalan, jembatan, dan sarana kesehatan.²³

Jadi kesimpulan cara meningkatkan pembangunan lembang adalah harus bisa melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan

²³ Pengembangan Lembang: Langkah Menuju Kemajuan (2023), diakses 13 Oktober 2023 dari [http:// www. panda.id](http://www.panda.id)> pembangunan

pembangunan dan juga memberikan pelatihan atau bantuan yang lebih baik kepada masyarakat

4. Tantangan Dalam Meningkatkan Pembangunan Lembang

- a. Kurang memadai fasilitas yang ada di lembang²⁴
- b. Disiplin perangkat masih rendah
- c. SDM perangkat masih rendah
- d. Penyebaran informasi yang kurang maksimal terhadap masyarakat.

²⁴ Eris Riswandi, Masalah dan Isu Strategis Desa (2022), diakses 14 Oktober 2023 dari <https://wangunsari.desa.id>>artikel